

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar

Sejarah kemajuan negara dan bangsa berpusat pada pendidikan. Menurut UU 1945 Pasal 3 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 20 tentang pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa menjadi individu yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Negara dan kemajuannya bergantung pada generasi mudanya, dan kualitas generasi muda tersebut bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh negara. Pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum adalah alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum adalah sistem terpusat yang terdiri dari komponen tentang mata pelajaran dan berbagai prosedur kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan instansi. Kurikulum memainkan peran penting dalam pendidikan karena berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan proses belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan. Kurikulum merupakan alat yang penting dalam melaksanakan program pendidikan, baik formal maupun informal yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga gambaran sistem pendidikan dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut.

Sistem pendidikan terdiri dari kurikulum yang menggerakkan dan memadukan proses pendidikan, terutama dalam pendidikan formal. Kurikulum menetapkan kegiatan pembelajaran yang kemudian disesuaikan dan diubah sehingga pendidikan tidak dapat berjalan tanpanya.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi diperlukan perbaikan pendidikan juga. Kurikulum merdeka belajar dirancang untuk menyempurnakan kurikulum 2013 sebelumnya di Indonesia dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam lingkungan yang tenang dan santai. Merdeka belajar dimaksudkan untuk memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka sendiri. Kurikulum merdeka meningkatkan pendidikan karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini terdiri dari enam dimensi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif.

Harmalik, (2015:16) menyatakan dalam Faridah et al., (2024) bahwa istilah kurikulum berasal dari Bahasa latin, yaitu berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang NO. 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang sangat penting dalam semua kegiatan pembelajaran dan menentukan kualitas pendidikan, perubahan kurikulum ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang tepat untuk proses pembelajaran seperti buku peserta didik. Perubahan ini akan berdampak pada mata pelajaran yang diajarkan termasuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Pembelajaran dan kurikulum adalah hal yang sangat terkait. Kurikulum berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tujuan, arah, dan pendidikan sedangkan belajar adalah proses yang terjadi melalui interaksi kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila, strategi kurikulum yang efektif dan efisien sangat penting. Ini karena dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, beban belajar pada setiap mata pelajaran

menjadi lebih sedikit menunjukkan bahwa kurikulum merdeka lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas. Untuk memberi guru lebih banyak waktu dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk menekankan materi penting.

Kurikulum merdeka berprinsip bahwa setiap siswa diberi kebebasan untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka ingin belajar. Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang menerima dan memfasilitasi semua perbedaan karakter siswa. Sebelum memulai proses pembelajaran diferensiasi guru biasanya melakukan evaluasi diagnostic. Tujuan dilakukan Asesment diagnostik yaitu untuk mendiagnosa siswa seperti siswa memiliki karakter apa dan pembelajaran seperti apa yang cocok. Semua itu difasilitasi per individu. Kurikulum merdeka berisi muatan kemerdekaan dalam memfasilitasi terhadap kemampuan dan karakter peserta didik. Pelaksanaan kurikulum ini dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visinya. Ini juga bertujuan untuk membangun sistem pendidikan menjadi struktur sosial yang kuat sehingga memungkinkan setiap warga negara Indonesia menjadi individu yang berkualitas tinggi yang mampu mengikuiti perkembangan zaman dan maju. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Diharapkan penyelenggara pendidikan dapat memungkinkan peningkatan kulaitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang akan menjadi faktor determinan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia sepanjang masa. Ada beberapa fungsi kurikulum, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi bagi sekolah sekurang-kuangnya memiliki dua fungsi yaitu :
 - Kurikulum sekolah atau madrasah pada dasarnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh institusi tersebut.

- Kurikulum sekolah atau madrasah berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Ini mencakup program apa yang diselenggarakan, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan program, dan perlengkapan apa yang diperlukan.
- 2. Fungsi kurikulum bagi guru adalah kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk merancang dan menilai kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah atau madrasah. Guru tidak hanya melaksanakan kurikulum, tetapi juga merancang dan menilai kurikulum itu sendiri.
- 3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah sebagai pengendali pelaksanaan kurikulum adalah menyusun dan menerapkan program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil program supervisi kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dalam upaya pengembangan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kurikulum sekolah, yang mencakup, antara lain: Sebagai pedoman untuk meningkatkan lingkungan belajar, Sebagai pedoman untuk membantu guru memperbaiki situasi belajar, Sebagai standar untuk pengembangan kurikulum dan evaluasi kemajuan kegiatan pembelajaran, Untuk mengembnagkan rencana dan program sekolah, Sebagai pedoman dan sumber daya yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi keberhasilan program pendidikan di lingkungan sekolah.
- 4. Fungsi kurikulum bagi pengawas (*supervisor*). Pengawas menggunakan kurikulum sebagai pedoman, standar, atau ukuran untuk menentukan aspek mana yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Fungsi bagi masyarakat dan pengguna lulusan.

Program merdeka belajar memiliki tujuan serta harapan yang bagus dan kualitas pendidikannya sangat baik. Dengan memanfaatkan belajara merdeka, pendidikan nasional akan berhasil mencetak siswa dan pelajar yang cerdas dan unggul. Salah satu masalahnya adalah apakah harapan akan dapat sejalan dengan keadaan saat ini. Dengan fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang

berkualitas, harapan akan tercapai dengan baik. Meskipun ditinjau dari situasi sekarang kita harus mengakui bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat buruk.

Selain itu, pemerintah menetapkan pendidikan merdeka belajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ide tentang pendidikan merdeka belajar sejalan dengan ide bapa pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara menyatakan dalam Oktavia & Qudsiyah, (2023), Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat dan potensi yang ada pada anak-anak, yaitu momong, among, dan ngemong. Hal tersebut yang dikembangkan menjadi tiga prinsip kepemimpinan di Taman Siswa: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Bahwa guru sebagai pengajar dan pendidik harus bisa menjadi suri teladan bagi muridnya. Guru harus memberikan pengajaran dan contoh yang baik. Guru harus bisa membimbing, mendampingi, mengasuh serta membina siswa agar bisa aktif dan kreatif dalam meraih prestasi. Guru harus bisa menjadi pendorong dan pemberi motivasi agar siswa lebih maju dan bersemangat dalam belajar. Belajar semboyan yang sangat cocok dengan konsep merdeka. Guru hanya memberi bahan dan siswa harus sadar, aktif, dan kreatif untuk mengembangkan materi secara mandiri. Guru mendorong dan memberi semangat kepada siswa untuk menjadi lebih kreatif dan terampil karena tujuan merdeka belajar adalah untuk mencapai hal ini.

Kurikulum merdeka belajar tidak hanya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, tetapi juga memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengelola kurikulum berdasarkan otonomi daerah. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang selama ini dikritik karena terlalu rinci dan kaku serta mewajibkan guru menghabiskan waktu lebih banyak untuk urusan administrasi, dengan penerapan kurikulum merdeka belajar segala rancangan dan rencana pembelajaran dibuat lebih ringkas dengan membuat komponen yang penting sehingga guru memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi pembelajaran.

Kurikulum merdeka di dasari tiga hal yaitu: berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum merdeka.

1. Struktur Minimum

Meskipun kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah dapat merancang program dan kegiatan tambahan sesuai dengan sumber daya, visi, dan misi yang tersedia.

2. Otonomi

Kurikulum memberi guru dan satuan pendidikan kebebasan untuk memilih dan proses pembelajaran yang relevan dan kontekstual.

3. Sederhana

Kurikulum sebelumnya mengalami perubahan yang signifikan, tetapi tidak banyak. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami oleh sekolah.

4. Gotong Royong

Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan instansi, diantaranya kementerian agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya.

5. Struktur Per Jenjang

Pembelajaran dengan kurikulum merdeka diatur berdasarkan jenjang, yaitu PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Kurikulum merdeka belajar yang dinilai cukup baru telah menyebabkan banyak masalah bagi siswa dalam pembelajaran khususnya pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Kurikulum merdeka belajar memerlukan waktu untuk disesuaikan karena akan berdampak pada prestasi akademik siswa dan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Berbagai faktor baik dari siswa maupun guru yang terlibat dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan

masalah dalam pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Salah satu penyebab problematika adalah kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menciptakan metode dan model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang tepat untuk diterapkan dalam kurikulum merdeka belajar.

(1) pengganti USBN menjadi penilaian menyeluruh, (2) pengubah Ujian Nasional (UN) menjadi penilaian Kompetensi Minimum (AKM), (3) penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (4) pengembangan lebih fleksibel Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Beberapa konsep penting kurikulum merdeka belajar adalah (1) belajar bukan untuk mengikuti ujian, akan tetapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna, (2) kegiatan belajar mengajar tidak dikendalikan oleh guru melainkan adanya kesepakatan antara guru dan siswa, (3) proses belajar yang tidak diseragamkan akan tetapi dibedakan berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, (4) peserta didik tidak hanya menghafal rumus-rumus dan teori melainkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan (5) belajar tidak hanya dilihat dari nilai yang tertuang dalam bentuk angka melainkan harus dilihat hasil karya dan kreatifitas peserta didik (Sulistiati, 2022) menyatakan dalam (Handayani, 2023).

Kurikulum merdeka belajar memiliki tiga ciri utama: (1) proyek sebagai pengembangan keterampilan halus dan sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, (2) penekanan pada materi penting sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, dan (3) kemampuan guru untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kemampuan siswa dan menyesuaikannya dengan konteks muatan lokal.

2.1.1.1 Kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka

Ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kurikulum merdeka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan

dengan kurikulum 2013 Almarisi (2023) menyebutkan dalam Supriatna et al., (2023) :

Setelah menyebutkan beberapa kelebihan kurikulum merdeka, dibawah ini diuraikan beberapa kekurangan kurikulum merdeka di antaranya:

- Kurikulum merdeka masih jauh sempurna dalam hal penerapan
- Sistem pendidikan dan pengajaran yang direncanakan tidak belum berhasil sepenuhnya
- Sistem yang tidak terstruktur dan kekurangan sumber daya manusia (SDM).

2.1.2 Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideology dan fisolofi utama. Dalam Bahasa sansekerta, Pancasila berarti lima sila atau lima asas. Ini adalah ide yang membentuk nilai, norma, dan etika masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila lima sila menunjukkan nilai-nilai inti yang terdiri dari nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Sebagai dasar negara Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Ini berarti bahwa pemerintahannya, kebijakannya, dan peraturannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk melindungi hak dan martabat negaranya dan memberi mereka kesempatan untuk hidup.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta mengucapkan kalimat terakhirnya mengubah frasa “negara: menjadi “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara yang sah. Oleh karena itu, Pancasila adalah kumpulan nilai dan prinsip konseptual yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan didalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan, yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Dr. Ujang Charda, 2017).

Pancasila sebagai dasar hukum negara untuk administrasi republic dikarenakan Pancasila adalah dasar dari semua undang-undang, dan karena Pancasila adalah dasar dari segala undang-undang maka semua peraturan konstruksi hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan kata lain, semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika ada peraturan yang bertentangan maka wajib dihapus dan dicabut.

Pancasila bersifat memaksa dan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Semua warga negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip hidup mereka selama mereka tidak melanggar undang-undang, karena Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menetapkan aturan ketatanegaraan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang 1945 hasilnya adalah bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai dari prinsip konseptual yang berfungsi sebaagai pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar hukum negara untuk aadministrasi publik seluruh undang-undang harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar hukum ini sesuai dengan alinea keempat konstitusi 1945.

Bersumber dari akar sistem sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan Bahasa dan adat istiadat, agama, ras, dan golongannya masing-masing Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Masyarakat-masyarakat ini memiliki banyak nilai yang sama meskipun mereka hidup ditempat yang berbeda. Masyarakat ini biasanya mempercayai dewa dan melakukan ritual budaya untuk memuja mereka. Kearifan, mufakat, pertimbangan, dan keterwakilan adalah nilai humanistic yang dianut oleh suku-suku Indonesia lainnya.

Menurut Essla et al., (2023) Pancasila merupakan suatu konsep hukum dan filosofis yang mendasarkan negara Indonesia. Teori di balik konsep ini sebagai berikut:

- a. Pancasila menjadi dasar hukum: Diakui sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia. Yang berarti hukum harus sejalan dengan nilai dan prinsip dalam Pancasila.
- b. Kepemimpinan berdasarkan Pancasila dinyatakan oleh Essla et al., (2023): Teori ini berasumsi bahwa para pemimpin negara, pemerintahan, dan lembaga publik mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
- c. Keberagaman dan Persatuan: Pancasila menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya memadukan persatuan nasional dan keragaman budaya.
- d. Keadilan Sosial: Teori ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Kepentingan bersama: Teori ini menekankan pentingnya kepentingan bersama negara dan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.
- f. Perdamaian dan Kemakmuran Tujuan utama teori Pancasila adalah mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Sebagai dasar negara Pancasila merupakan konsep yang kuat dalam pembangunan negara Indonesia. Ini menggabungkan nilai-nilai sosial,

politik dan etika dalam kerangka yang mendefinisikan dasar hukum, pemerintah dan masyarakat. Konsep inilah yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia hingga saat ini.

Nilai-nilai Pancasila bukan hanya objektif, tetapi juga subjektif karena mereka berasal dari Indonesia sendiri. Pancasila adalah gagasan tentang bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Nilai spiritual terdiri dari nilai Pancasila yang ketiga. Nilai kebaikan berasal dari kesadaran manusia, nilai estetika berasal dari kesadaran akan keindahan, nilai keagamaan berasal dari ajaran agama, dan nilai lainnya berasal dari tindakan dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pancasila didefinisikan sebagai *staatsfundamentalnorm*, yang berarti prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup bagi setiap negara ketika menjalankan fungsinya. Gagasan tentang cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) terdiri dari dasar negara. Mengubah berarti menghapus seluruh struktur yang membentuk dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Segala sumber hukum berasal dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat.

Pancasila sebagai wadah untuk keanekaragaman masyarakat dengan tujuan dasar yang berbeda untuk setiap silanya. Ketuhanan yang maha esa adalah dasar sila pertama, yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negaranya. Hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya dilindungi oleh Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tidak memperlakukan orang lain dengan kasar. Warga negara harus menghormati hukum dan kekuasaan yang ada.

Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya Oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara Indonesia (Kaelan, 1996: 92) menyatakan dalam (R. Sari & Najicha,

2022). Semua sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila memiliki lima fungsi penting, diantaranya sebagai berikut:

- Pancasila sebagai pedoman hidup berfungsi sebagai dasar dari semua pandangan yang ada di Indonesia. Dalam situasi tertentu, Pancasila harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusannya sendiri.
- Pancasila sebagai jiwa bangsa, harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus ada di semua lembaga baik organisasi maupun individu di Indonesia.
- Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga disebut identitas bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila harus ada di dalam setiap orang agar dapat membuatnya sebagai kepribadian bangsa dan ciri khas bangsa Indonesia.
- Sebagai sumber hukum Pancasila berfungsi sebagai landasan segala undang-undang di Indonesia. Dengan kata lain, sebagai dasar negara tidak boleh ada persatuan yang bertentangan dengan Pancasila.
- Pancasila sebagai cita-cita bangsa pada fungsi ini dibuat sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia kita harus berharap negara kita menjadi negara yang bersatu, menghormati, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

2. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian ini kemudian dimasukkan ke dalam memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) pada tanggal 9 juni 1966. Ketetapan MPR No. XVIII tahun 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara memperkuat penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Negara Indonesia adalah negara Pancasila karena Pancasila adalah dasar negaranya.

Kirdi Dipoyudo mengemukakan dalam R. Sari & Najicha, (2022) bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah.

Secara filosofis Pancasila sebagai dasar negara telah ada sejak awal berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Pancasila telah terbukti benar karena mampu menyatukan rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai dan prinsip yang unuil agar masyarakat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila mereka harus diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya nilai-nilai Pancasila yang harus dipahami, tetapi etika, moral, dan karakternya juga haru dipahami dan diterapkan. Diharapkan setiap masyarakat ingin mempelajari nilai dan fungsi Pancasila karena rakyat yang cerdas menciptakan negara yang hebat. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam diri setiap orang mulai dari kecil hingga dewasa.

2.1.3 Indikator Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Tabel 2.1 Indikator Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kedudukan dan Fungsi Pancasila	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa.	- Mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
	Menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.	- Mampu menjelaskan secara rinci kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
	Berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.	- Memahami bahwa tenggang rasa penting untuk menjaga

	<ul style="list-style-type: none"> - Berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. - Berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> kerukunan dan persatuan bangsa. - Menunjukkan kepedulian terhadap sesama, baik dalam keluarga, lingkungan sekitar, maupun masyarakat luas. - Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri.
--	--	---

Sumber : (Anggraini, 2023)

2.2 Penelitian yang Relevan

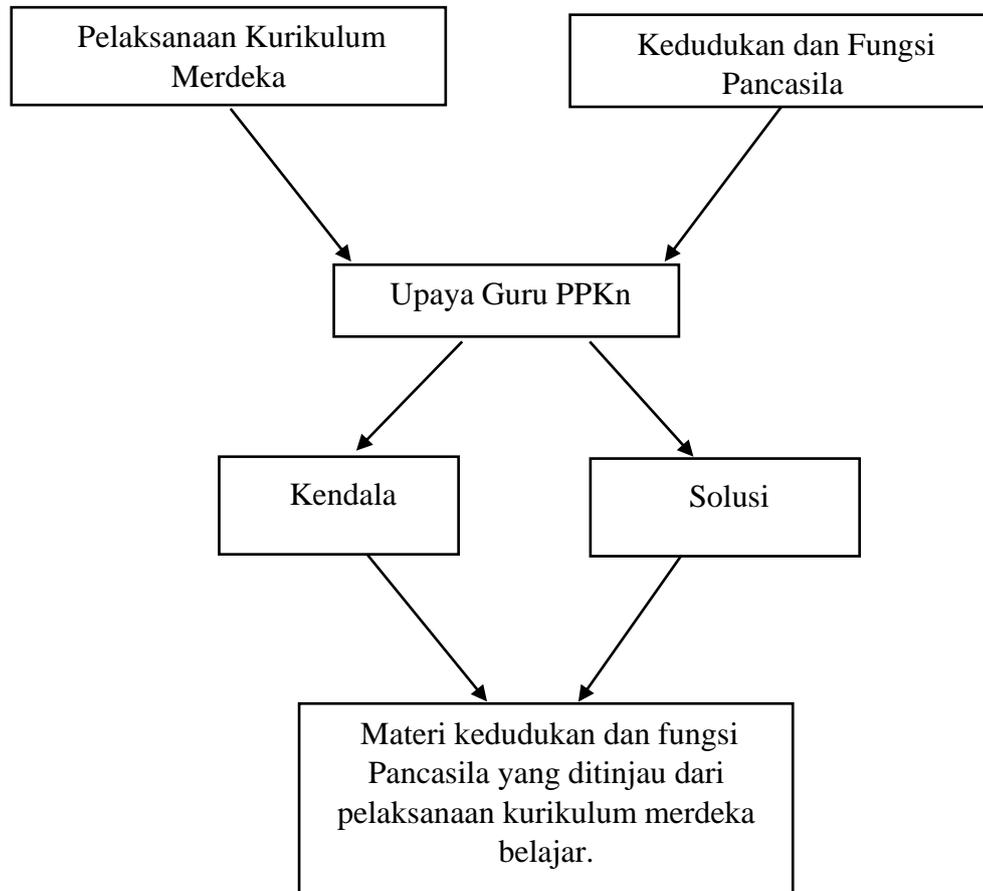
Perbedaan dari tinjauan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel Y yang diteliti. Pada penelitian terdahulu variabel y yang digunakan adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila, sedangkan penelitian saat ini variabel y yang diteliti adalah pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila.

Kedua, oleh Sabina et al., (2021) yang berjudul “ Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya.” Dengan topik yang diangkat yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara dan implementasinya maka penulis tertarik menganalisis hal tersebut karena sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat penting untuk bangsa.

Perbedaan dari tinjauan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yang dasar pembahasannya didapatkan dari berbagai sumber yang ada yaitu jurnal dan artikel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dasar pembahasannya didapatkan dari hasil wawancara guru dan siswa serta jurnal maupun artikel.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian ini pada pelaksanaan kurikulum merdeka dan kemudian variabel yang diteliti adalah pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila kelas VIII di SMP Negeri 1 Rantau Selatan. Hasil penelitian ini adalah meninjau pelaksanaan kurikulum merdeka pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila di SMP Negeri 1 Rantau Selatan. Dari segi objek penelitian, variabel penelitian, dan teknik untuk mendapatkan hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah peneliti jabarkan diatas, penelitian ini berfokus pada kedudukan dan fungsi Pancasila yang hasilnya dikumpulkan peneliti berdasarkan wawancara dari guru PPKn kelas VIII mengenai materi kedudukan dan fungsi Pancasila serta wawancara dengan siswa kelas VIII, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah menengah pertama.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar

Untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada materi kedudukan dan fungsi pancasila, strategi kurikulum yang efektif dan efisien sangat penting. Ini karena dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, beban belajar pada setiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit menunjukkan bahwa kurikulum merdeka lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pelaksanaan kurikulum ini dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visinya.

2. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila didefinisikan sebagai *staatsfundamentalnorm*, yang berarti prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup bagi setiap negara ketika menjalankan fungsinya. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Segala sumber hukum berasal dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat.

3. Upaya Guru PPKn

Dari kedua variabel penelitian diatas maka akan tercipta upaya guru PPKn terhadap materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang kemudia ditinjau dari kurikulum merdeka. Setelah upaya tersebut maka akan tercipta kendala dan solusi dari permasalahan tersebut yang kemudian menghasilkan hasil akhir dari penelitian ini yaitu materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang ditinjau dari pelaksanaan kurikulum merdeka.